

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN, TRANSPARANSI DAN PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA**Putu Putri Prawitasari^{1*}, Made Ratih Nurmalasari², Ayu Indira Dewiningrat³, Ni Putu Ari Krismajayanti⁴**Universitas Pendidikan Nasional
Email: putriprawitasari@undiknas.ac.id**Abstrak**

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terkait dengan adanya pengendalian internal, transparansi dan penerapan Aplikasi Siskeudes. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, transparansi dan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas keuangan desa. Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan perilaku responden mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Transparansi, dan Penerapan SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Badung Bali. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, transparansi dan penerapan Siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa. Semakin baik pengendalian internal, transparansi dan penerapan Siskeudes maka semakin tinggi pula akuntabilitas keuangan desa. Pentingnya hasil penelitian sebagai bahan evaluasi bagi perangkat desa Kabupaten Badung pada khususnya dan masyarakat mengenai bagaimana pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan umum.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Transparansi, Siskeudes, Akuntabilitas**Abstract**

The realization of village financial management accountability is related to the existence of internal control, transparency and implementation of the Application Siskeudes. The purpose of the study was to determine the effect of internal control, transparency and the application of the Village Financial System Application (Siskeudes) on village financial accountability. The research to be carried out is a descriptive research type and uses a quantitative approach that describes the behavior of respondents regarding the influence of the Internal Control System, Transparency, and Application SISKEUDES on Village Financial Accountability in Badung Regency, Bali. The technique used in sampling in this study is a convenience sampling technique. The results showed that internal control, transparency and application Siskeudes had a positive effect on village financial accountability. The better the internal control, transparency and implementation Siskeudes, the higher the accountability of village finances. The importance of research

How to cite:	Putu Putri Prawitasari, Made Ratih Nurmalasari, Ayu Indira Dewiningrat, Ni Putu Ari Krismajayanti (2023), Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Akuntabilitas Keuangan Desa, (5) 12, https:// 10.46799/syntax-idea.v5i12.2701
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

results as an evaluation material for the village apparatus of Badung Regency in particular and the community regarding how the management is accountable so that it can create prosperity for the public interest.

Keywords: *Internal Control System, Transparency, Siskeudes, Accountability*

PENDAHULUAN

Pengertian tentang desa salah satunya dijelaskan pada Undang-Undang No.614 tentang Desa, di mana dijelaskan jika Desa merupakan suatu unit masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang dalam mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut dengan keinginan masyarakat, hak asal usul, maupun hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan NKRI.

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa menjadi pemerintahan yang paling rendah. Setelah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 disahkan, hal tersebut menjadi pilar baru bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan pertumbuhan *bottom-up* serta memberikan wewenang yang mana dibandingkan waktu dulu sekarang menjadi semakin besar. Terkait UU tersebut yang menjadi pedoman untuk pemerintah pusat dalam memposisikan APBN langsung pada pemerintahan di desa yang dinamakan dana desa.

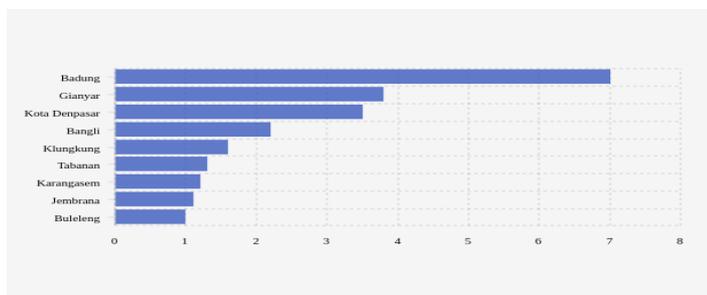
Munculnya tuntutan masyarakat pada pelaksanaan pemerintah yang bersih, akuntabel serta transparan perlu ditindaklanjuti melalui penerapan *good governance*. *Good governance* dan *clean government* sudah memacu seluruh pelaksana negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah agar bisa melakukan pengelolaan anggaran berdasarkan amanat UU. Akan tetapi fakta dilapangan ditemui banyak pemerintah daerah yang untuk tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih masih belum siap.

Pertanggungjawaban terkait keuangan desa bisa direalisasikan pada LKPD, jadi untuk merealisasikan pertanggungjawaban keuangan desa yang baik serta memadai, kemudian LKPD dirancang serta ditampilkan menurut SAP Desa. Isi dari SAP Desa yakni transparan dan akuntabilitas. Transparan artinya bersifat jujur serta terbuka mengenai keuangan desa supaya masyarakat tahu tentang pengelolaan keuangan desa diselenggarakan dengan baik atau tidak, sebab masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya. Sementara akuntabilitas merupakan sifat tanggungjawab yang wajib dipunyai oleh kepala desa serta perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa.

ICW mendapati bila petugas yang berwajib sangat sering menanggapi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan anggaran dana desa. Pada tahun 2021 tercatat ada 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebanyak Rp233 miliar. Bali sebagai salah satu pulau destinasi wisata memiliki beragam kebudayaan dan desa. Adanya tindak kasus korupsi yang terjadi di Bali seperti kasus yang dilansir dari Balipost.com mengenai Majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila akhirnya menjatuhkan hukuman kepada I Made Rai Sukadana, selama setahun tiga bulan atau 15 bulan pada sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sedangkan, mantan Perbekel Mengwitani itu pun didenda sekitar Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan. Beberapa perkara dugaan korupsi khusus lainnya kasus yang terjadi atas dana pungutan Kota Denpasar di Desa Pemecutan Kaja serta kasus

dugaan korupsi APBDes Desa Dauh Puri Klod, sudah diberikan dari pihak Kejari Denpasar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. (Balipuspanews.com, 2020)

Celah korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa selama 2 tahun terakhir di Kabupaten Badung seperti ada dua indikasi penyelewengan dana APBDes yakni pembangunan banjar dan di Desa Dalung dalam program pembuatan paving serta pembangunan tambahan Kantor Desa Dalung, penyelewengan dana desa ini yang terjadi di salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Abiansemal yang telah berjalan 3 tahun (Nusabali.com, 2017). Kelian Pura Banjar Bedauh diduga menyelewengkan dana hibah dalam pembangunan Pura Dalem Kebon. Dalam kasus tersebut negara merugi sekitar Rp 116.453.000 (Balipost.com, 2019b). Kepala Desa Baha diduga menjalankan tindakan korupsi APBDes tahun anggaran 2016/2017. Dalam hal itu kerugian negara ditaksir sekitar lebih dari Rp 1 Miliar. (Balipost.com, 2019a)



Gambar 1

Grafik Kabupaten/Kota dengan jumlah korupsi terbanyak di Provinsi Bali selama Semester I/2020

Sumber : Databoks.katadata.co.id, 2023

Adapun grafik Kabupaten/Kota dengan jumlah korupsi terbanyak selama Semester I/2020 menurut data yang diperoleh Dari Databoks.katadata.co.id, 2023) menunjukkan data pada grafik diatas dimana data tertinggi kasus korupsi dana desa Provinsi Bali jumlah korupsi tertinggi adalah Kabupaten Badung. Beberapa kasus korupsi yang timbul menuntut terdapat sistem pengendalian intern, transparansi serta penerapan sistem akuntansi dana desa yang baik, dimana sistem ini kita kenal dengan SISKEUDES. Terkait hal ini kemudian muncul tuntutan untuk Pemerintah desa supaya memperlihatkan dengan nyata akuntabilitasnya yang baik pada Pemerintah pusat. Implementasi sistem keuangan desa diharap bisa menghentikan tindak korupsi dana desa yang selalu terjadi.

Pemerintah pusat sebagai *principal* sangat mendukung Pemerintah Desa supaya dapat mengelola dana desa yang akuntabel. Dukungan tersebut terbukti dari BPKP yang sudah menerbitkan sistem informasi akuntansi dengan basis aplikasi yang dinamakan SISKEUDES. Penciptaan SISKEUDES bertujuan untuk memberi bantuan untuk menaikkan akuntabilitas Pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa. Keberhasilan SIKEUDES berdasarkan segi *Information Quality* dan *Service Quality* sudah bisa mendukung kepuasan pemakainya untuk menyusun laporan keuangan. Akuntabilitas Keuangan Desa melalui pengimplementasian aplikasi SISKEUDES menghadirkan warna

baru dan menjadikan semakin baik antara lain memberi kemudahan pada proses pelaporan pertanggungjawaban serta menampilkan pendapatan hasil dari adanya peningkatan pertumbuhan pada kualitas desa yang makin baik, hasil laporan keuangan yang disampaikan sudah sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah ditetapkan, dan untuk implementasi aplikasi SISKEUDES bisa menyajikan hasil laporan keuangan yang sifatnya akuntabel (Juardi, 2018).

Pada realisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibutuhkan pengawasan terkait seluruh kegiatan yang dijalankan. SPIP bisa menjadi acuan serta standar pengendalian pada pengelolaan keuangan desa. Pemerintah pusat telah mempunyai sistem dalam menyelenggarakan pengawasan yakni pengendalian intern pemerintah. Perkembangan teknologi dan informasi sekarang semakin meningkat, BPKP sebagai pengemban mandat dalam menjalankan pengawasan pada akuntabilitas keuangan desa, menciptakan sebuah aplikasi untuk mengelola keuangan desa yakni SISKEUDES. Implementasi SISKEUDES dalam mempermudah dalam menyampaikan laporan keuangan, disamping itu juga dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dengan optimal dan menjadi acuan dalam mengelola keuangan desa jadi tidak melenceng dari ketentuan yang terdapat di dalam aturan UU (G.Ayu et al., 2017). Pandemi covid 19 menyebabkan menyebabkan pelemahan ekonomi hampir pada semua sektor. Masyarakat menjadi terbiasa menggunakan teknologi digital, tidak terkecuali di Desa. Sehingga pelaksanaan pengelolaan SISKEUDES menjadi lebih optimal.

KPK Republik Indonesia sangat menyoroti maraknya kejadian penyelewengan dana desa. KPK merespon fenomena tersebut dengan menggeber program Desa Anti korupsi, di mana yang menjadi pilot projeknya adalah Kabupaten Badung. Berkaitan dengan hal itu, I Nyoman Giri Prasta selaku Bupati Badung telah mengadakan audiensi dengan Tim KPK Pusat yang diketuai Rino Haruno bersama Herlina Jeane Aldian dan dengan Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat yaitu diwakili oleh Friesmount Wongso, berkaitan dengan wilayah Kabupaten Badung dijadikan menjadi pilot projek dalam hal Desa Anti Korupsi. (Balitribune.co.id)

Pendapat dari Rita Martini dkk., (2019) dan Siti Hasanah et al., (2021), memaparkan jika SPIP secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengaturan keuangan desa Kabupaten Buleleng. Berbeda dengan penelitiannya Eli Budi Santoso (2016) memaparkan bahwa SPIP tidak secara signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas finansial daerah. Enggar Wahyuning Pahlawan et al., (2020) menguraikan jika SPIP tidak secara signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan sebuah dana desa. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Muhammad Sapril Sardi Juardi (2018) menjelaskan jika SPIP tidak secara signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas kemampuan entitas pemerintahan, sehingga dari penjelasan di atas ada inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh SPIP dengan akuntabilitas.

Enggar Wahyuning Pahlawan et al., (2020) menyampaikan jika penerapan SISKEUDES tidak signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan data yang dipublikasikan dan beberapa kasus terkait penggunaan dana

Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Akuntabilitas Keuangan Desa

desa pada Kabupaten Badung menunjukkan ketidakselarasan terhadap tujuan dikembangkannya SISKEUDES tersebut yang artinya akuntabilitas dalam pemerintah desa dikategorikan sangat rendah. Tujuan dari menciptakan SISKEUDES adalah untuk mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mengingat keseluruhan kegiatan belanja yang diselenggarakan oleh desa wajib didokumentasikan dalam sistem, akan tetapi dalam mengaktualisasikannya masih terdapat fraud dalam pengaturan keuangan desa. Berdasarkan indikasi peristiwa-peristiwa tersebut artinya ada ketidakselarasan diantara konsep dan realisasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan perilaku responden mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Transparansi, dan Penerapan Aplikasi SISKEUDES pada Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Badung Bali. Berdasarkan objek penelitian, maka dalam penelitian ini populasinya ialah semua perangkat desa yang menjadi pengelola keuangan desa di Kabupaten Badung Bali.

Tabel 1
Jumlah Desa dan kelurahan di Kabupaten Badung

Kecamatan	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Abiansemal	Desa	Abiansemal, Angantaka, Ayunan, Blahkiuh, Bongkasa, Bongkasa Pertiwi, Darmasaba, Dauh Yeh Cani, Jagapati, Mambal, Mekar Bhuana, Punggul, Sangeh, Sedang, Selat, Sibang Gede, Sibang Kaja, Taman
	Kelurahan	-
Kuta	Kelurahan	Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian, Seminyak
	Desa	Pecatu, Ungasan, Kutuh
Kuta Selatan	Kelurahan	Benoa , Tanjung Benoa , Jimbaran
	Desa	Canggu, Dalung, Tibubeneng
Kuta Utara	Kelurahan	Kerobokan, Kerobokan Kelod, Kerobokan Kaja
	Desa	Baha, Buduk, Cemagi, Gulingan, Kekeran, Kuwum, Mengwi, Mengwitani, Munggu, Pinarungan, Pererenan, Sembung, Sobangan, Tumbak Bayuh, werdi Bhuwana
Mengwi	Kelurahan	Abianbase, Kapal, Lukluk, Sading, Sempidi
	Desa	Belok, Carang Sari, Getasan, Pangsan, Pelaga
Petang	Kelurahan	-

Sumber :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran
Pengendalian Intern (X ₁)	Sistem Pengendalian Intern merupakan sebuah proses yang terintegrasi terhadap tindakan serta aktivitas yang dilaksanakan secara kontinyu oleh pimpinan dan segenap pegawai dalam meyakinkan secara representatif terkait dengan pencapaian tujuan organisasi lewat aktivitas yang efektif dan efisien, keunggulan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan pada aturan UU. (PP No 60 Tahun 2008)	1.Lingkungan Pengendalian membentuk serta mempertahankan lingkungan pengendalian yang menyebabkan tingkah laku yang positif serta kondusif dalam aplikasi SPIP di lingkungan kerjanya dengan cara: a. menegakkan integritas serta nilai etika b.komitmen pada kompetensi c.kepemimpinan yang kondusif d.membentuk struktur organisasi berdasarkan kebutuhan e.pendelegasian otoritas serta tanggung jawab yang tepat f.pembuatan serta pengaplikasian kebijakan yang sehat mengenai pembinaan SDM g. perwujudan yang efektif dari peran dari petugas pengawasan intern pemerintah h. hubungan kerja yang baik terhadap Instansi Pemerintah terkait

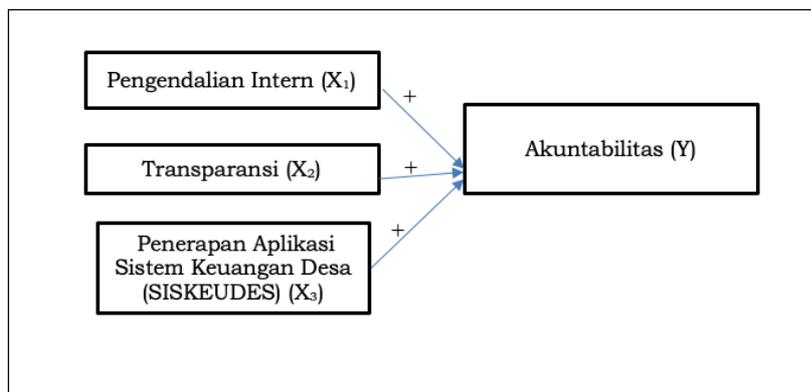
		<p>2. Penilaian Resiko</p> <p>a. Pengendalian intern harus memberi penilaian terkait resiko yang dihadapi satuan organisasi baik esktern ataupun intern</p> <p>b. identifikasi risiko serta analisis resiko</p> <p>3. Kegiatan Pengendalian</p> <p>a. Memastikan jika instruksi pimpinan Instansi Pemerintah dijalankan</p> <p>b. Kegiatan pengendalian harus efisien serta efektif untuk mencapai tujuan organisasi</p> <p>c. Efektifitas dan efesiensi untuk mencapai tujuan harus selaras terhadap ukuran, kompleksitas serta sifat dari tupoksi sebuah instansi pemerintahan terkait</p> <p>4. Informasi Komunikasi</p> <p>Pimpinan Instansi Pemerintah berkewajiban untuk melakukan identifikasi, pencatatan serta menyampaikan informasi dalam bentuk serta waktu yang tepat dan wajib diaplikasikan secara efektif.</p> <p>5. Pengawasan dan Pengendalian Intern</p> <p>Pengawasan berkesinambungan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut evaluasi hasil</p>
--	--	---

		audit serta evaluasi yang lain.
Transparansi (X ₂)	SI Hanifah (2015) menyebutkan transparansi berarti pemerintah menyampaikan sesuatu yang sifatnya material secara periodik pada pihak yang berkepentingan, terkait hal tersebut adalah masyarakat luas jadi prinsip transparansi yang memungkinkan masyarakat dalam mengetahui serta memperoleh akses informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan desa.	Transparansi yang dipaparkan oleh Debi Putri Pertiwi (2015) menyampaikan jika transparansi bisa dinilai dari sejumlah indikator : a. Ketersediaan serta aksesibilitas dokumen b. Kejelasan serta kelengkapan informasi c. Transparansi proses d. Kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan
Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X ₃)	Penerapan Aplikasi SISKEUDES sebagai suatu sistem yang dikembangkan dengan aplikasi berbasis sistem informasi akuntansi dalam menunjang pengelolaan keuangan desa menurut aturan yang diterapkan, prinsip efektivitas pada pemakaian aplikasi SISKEUDES sangat dibutuhkan supaya konsumsi keuangan desa bisa dipakai berdasarkan kebutuhan, diselenggarakan melalui perencanaan sampai pertanggung jawaban yang cepat, akurat, transparansi, serta akuntabel. (Parwati dkk., 2017)	Indikator yang digunakan : a. Keakurasian b. Ketepatan c. Kemudahan
Akuntabilitas (Y)	Akuntabilitas adalah kewajiban yang dipunyai	Indikator dalam penelitian ini

Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Akuntabilitas Keuangan Desa

	<p>oleh individu yang diamanati mengelola sumber daya melalui mempertanggungjawabkan serta menjelaskan kinerja individu, badan hukum, ataupun pemimpin pada yang memiliki hak menerima pertanggungjawaban serta keterangan (Fajri R., 2015)</p>	<p>dikembangkan oleh Mada dkk., (2017):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Kejujuran serta transparansi informasi b. ketaatan terkait pelaporan 2. Proses <ol style="list-style-type: none"> a. Kecocokan prosedur b. Kecukupan informasi c. Ketepatan dalam menyampaikan laporan
--	---	---

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini :



Gambar 2
Kerangka berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini memakai korelasi product moment dengan hasil berada dalam tabel 2, 3 dan 4 dan hasil reliabilitas sesuai dengan tabel 5. Instrumen disebut valid bila nilainya > 0,3, sedangkan tidak valid bila nilainya < 0,3 (Sugiyono, 2019). Nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrument pada penelitian ini dikatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dari hasil uji validitas berikut:

Tabel 3
Uji Validitas pada Variabel Sistem Pengendalian Intern

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
X1.1	Pearson Correlation	1	.776*	.734*	.739*	.869*	.810*	.693*	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.776*	1	.783*	.896*	.702*	.797*	.775*	.836*
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.734*	.783*	1	.866*	.747*	.804*	.743*	.770*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.739*	.896*	.866*	1	.703*	.805*	.777*	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.869*	.702*	.747*	.703*	1	.785*	.741*	.719*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	.810*	.797*	.804*	.805*	.785*	1	.866*	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	.693*	.775*	.743*	.777*	.741*	.866*	1	.759*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.8	Pearson Correlation	.752*	.836*	.770*	.795*	.719*	.719*	.759*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.9	Pearson Correlation	.750*	.831**	.719*	.792*	.782*	.702*	.643*	.768*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.10	Pearson Correlation	.783*	.774*	.768*	.710*	.772*	.830*	.692*	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.11	Pearson Correlation	.757*	.743*	.845*	.773*	.749*	.841*	.826*	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.12	Pearson Correlation	.751*	.766*	.694*	.751*	.723*	.794*	.798*	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.13	Pearson Correlation	.778*	.761**	.717*	.714*	.839*	.810*	.820*	.733*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.14	Pearson Correlation	.766*	.783*	.796*	.785*	.747*	.870*	.755*	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.15	Pearson Correlation	.797*	.915*	.779*	.834*	.718*	.824*	.760*	.872*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	.884*	.910*	.880*	.893*	.872*	.919*	.872*	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4
Uji Validitas pada Variabel Transparansi

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.847**	.757**	.775**	.922**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.847**	1	.814**	.736**	.918**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.757**	.814**	1	.834**	.921**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.775**	.736**	.834**	1	.916**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.922**	.918**	.921**	.916**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 5
Uji Validitas pada Variabel Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

		Correlations			
		X3.1	X3.2	X3.3	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.768**	.721**	.908**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.768**	1	.770**	.930**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.721**	.770**	1	.904**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	.908**	.930**	.904**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 6
Uji Validitas pada Variabel Akuntabilitas

		Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.745**	.671**	.785**	.687**	.880**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	.745**	1	.843**	.689**	.753**	.908**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	.671**	.843**	1	.695**	.679**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	.785**	.689**	.695**	1	.827**	.896**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.5	Pearson Correlation	.687**	.753**	.679**	.827**	1	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.880**	.908**	.877**	.896**	.883**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

b. Tabel Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah sebuah pengukuran instrumen yang jika dipakai untuk beberapa kali pengukuran obyek yang sama, akan menciptakan data yang sama. Dalam hal ini reliabilitas diuji dengan Cronbach Alpha. Sebuah variabel disebut reliabel bila memberi nilai Croanbach Alpha > 0,60 jadi bisa disebut bila instrumen yang dipakai itu reliabel(Arikunto Suharsimi, 2019). Proses pengujian diselenggarakan sebelum penelitian yang sesungguhnya diselenggarakan. Item pernyataan yang tidak valid serta reliabel tidak dipakai pada penelitian sebenarnya. Hasil pengujian reliabilitas pada setiap variabel diringkas dalam tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7
Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern	0,981	Reliabel
Transparansi	0,936	Reliabel
Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	0,901	Reliabel
Akuntabilitas	0,932	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi, nilai residualnya memiliki distribusi normal atau tidak. Pendapat dari Imam Ghozali (2019) uji normalitas dapat memakai Uji Kolmogorv Smirnov dari nilai residual sebuah model regresi. Berdasarkan syarat bila nilai signifikansinya diatas 0.05, datanya mempunyai distribusi normal.

Berikut adalah hasil pengujiannya:

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		230
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.51962400
Most Extreme Differences	Absolute	.038
	Positive	.036
	Negative	-.038
Test Statistic		.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

□

Berdasarkan tabel tersebut terlihat jika nilai signifikansi nya yaitu 0.200 yang artinya nilainya diatas 0.05 sehingga datanya mempunyai distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai dalam melakukan pengujian terhadap ada tidaknya korelasi diantara variabel bebasnya. Sementara model yang baik antar variabel bebasnya tidak saling berkorelasi. Penentuannya yaitu dengan melihat nilai toleransi serta VIF. Bila nilai toleransi > 0,1 dan VIF < 10, artinya bisa ditarik kesimpulan antar variabel bebasnya

tidak mengalami gejala multikolinieritas. Dibawah ini merupakan nilai VIF dalam penelitian ini:

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.

Coefficients ^a				
Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
1	X1	.217	4.617	
	X2	.210	4.768	
	X3	.218	4.591	

a. Dependent Variable: Y

Uji Hipotesis

a. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed ^a						
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method			
1	X3, X1, X2 ^b	.	Enter			

a. Dependent Variable: Absolut Residual
b. All requested variables entered.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.273	.078		16.337	.000
	X1	.120	.093	.100	1.299	.195
	X2	.011	.058	.015	.185	.853
	X3	.066	.076	.074	.858	.392

a. Dependent Variable: Absolut Residual

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah residualnya mempunyai varian yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini dalam melakukan deteksi gejala heteroskedastisitas dengan uji glesjer. Hasil pengujian ini terlihat dari nilai sig. dari setiap variabel yaitu $> 0,05$ yang menunjukkan bila semua variabel itu bisa disebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 11 Analisis Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.933 ^a	.870	.868	1.52968

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3525.771	3	1175.257	502.266	.000 ^b
	Residual	528.820	226	2.340		
	Total	4054.591	229			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant) X3 X1 X2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.835	.508		1.643	.102
	X1	.115	.016	.378	7.331	.000
	X2	.436	.066	.345	6.580	.000
	X3	.430	.086	.258	5.005	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari data tersebut dapat dituliskan persamaan seperti di bawah ini :

$$Y = 0,378 X_1 + 0,345 X_2 + 0,258 X_3 \dots \dots \dots (1)$$

Dari persamaan diatas, bisa diuraikan hal-hal berikut:

- 1) $\beta_1 = 0,378$ artinya mengindikasikan jika nilai Pengendalian Intern (X_1) meningkat 1 satuan, berarti nilai dari Akuntabilitas (Y) naik sebanyak 0,378 satuan dengan syarat variabel bebas lainnya sama
- 2) $\beta_2 = 0,345$ artinya mengindikasikan jika nilai Trasnparansi (X_2) meningkat 1 satuan, berarti nilai dari Akuntabilitas (Y) naik sebanyak 0,345 satuan dengan syarat variabel bebas lainnya sama
- 3) $\beta_3 = 0,258$ berarti mengindikasikan jika nilai Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X_3) meningkat 1 satuan, berarti nilai dari Akuntabilitas (Y) naik sebanyak 0,258 satuan dengan syarat variabel bebas lainnya sama

b. Uji Hipotesis (Uji t)

1) Pengujian Hipotesis 1

Hasil dari pengujian variabel Pengendalian Intern yaitu 0,000 artinya taraf sig. t dalam uji satu sisi yaitu $0,0000 < 0,05$ dan nilai β positif yaitu 0,378. Hal itu memperlihatkan jika Pengendalian Intern memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas jadi menerima H1.

2) Pengujian Hipotesis 2

Hasil dari pengujian variabel Persepsi Trasnparansi yaitu 0,000 artinya taraf sig.t dalam uji satu sisi yaitu $0,0000 < 0,05$ dan nilai β positif yaitu 0,345. Hal itu memperlihatkan jika Pengendalian Intern memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas bahwa Trasnparansi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas jadi menerima H2.

3) Pengujian Hipotesis 3

Hasil dari pengujian variabel Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu 0,000 artinya taraf sig.t dalam uji satu sisi yaitu $0,0000 < 0,05$ dan nilai β positif yaitu 0,258. Hal itu memperlihatkan jika Pengendalian Intern memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas bahwa Penerapan Aplikasi

SISKEUDES secara signifikan positif dalam mempengaruhi Akuntabilitas jadi menerima H3.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hipotesis pertama H₁ yang membuktikan jika Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif pada Akuntabilitas diterima. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan melihat pengaruh Pengendalian Intern pada Akuntabilitas Keuangan Desa. Penelitian ini menunjukkan hasil makin besar Pengendalian Intern artinya Akuntabilitas Keuangan Desa makin tinggi pula. Sedangkan makin lemah Pengendalian Intern artinya Akuntabilitas Keuangan Desa juga makin rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa makin besar Pengendalian Intern yang dipunyai oleh desa, artinya akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa. Pemerintah desa sudah melaksanakan nilai-nilai pada pengendalian intern, baik untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, pelaporan pengelolaan keuangan dengan unggul, mengamankan aset serta memacu kepatuhan pada aturan UU.

Maka jika ingin menaikkan Akuntabilitas Keuangan Desa, Pengendalian Intern bisa ditingkatkan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Abdul Halim (2022) membuktikan jika dalam mendukung akuntabilitas diperlukan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan public accountability cuma bisa terealisasi melalui sistem pengawasan yang representatif dari DPRD serta mengharapkan supaya lembaga audit bersikap professional, independen dan objektif Abdul Halim (2022). Hal serupa ditemukan pada penelitian Rita Martini dkk., (2019) yang membuktikan jika SPIP mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hipotesis kedua H₂ yang menjelaskan jika Transparansi secara positif mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa diterima. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan melihat pengaruh Transparansi pada Akuntabilitas Keuangan Desa. Penelitian ini menunjukkan hasil makin tinggi Transparansi artinya Akuntabilitas Keuangan Desa makin tinggi pula. Sedangkan makin lemah transparansi artinya Akuntabilitas Keuangan Desa juga makin rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika ingin meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa, maka Transparansi dapat ditingkatkan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Umami Risyah & Idang Nurodin (2017) yang menyimpulkan bahwa transparansi mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan desa dibutuhkan pertanggungjawaban atau akuntabel yaitu sebuah kewajiban seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) dalam memastikan jika tugas dan kewajiban yang diembannya sudah diselenggarakan secara baik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengaruh Penerapan Aplikasi SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hipotesis ketiga H₃ yang menjelaskan Penerapan Aplikasi SISKEUDES berpengaruh positif pada Akuntabilitas Keuangan Desa diterima. Tujuan penelitian ini yaitu agar melihat pengaruh Penerapan Aplikasi SISKEUDES pada Akuntabilitas Keuangan Desa. Penelitian ini memperlihatkan hasil makin tinggi Penerapan Aplikasi

SISKEUDES artinya Akuntabilitas Keuangan Desa juga makin tinggi. Sebaliknya semakin rendah Penerapan Aplikasi SISKEUDES artinya Akuntabilitas Keuangan Desa makin rendah pula. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika ingin meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa, maka Penerapan Aplikasi SISKEUDES dapat ditingkatkan. Harafonna dkk., 2019) yang membuktikan jika SISKEUDES desa mempengaruhi secara positif pada akuntabilitas. Melalui SISKEUDES seperti halnya penerapan SIMDA keuangan sudah memudahkan aktivitas terkait pelaporan dengan sangat baik jadi akuntabilitasnya sudah mencapai tingkat yang optimal (Hermadhani Adi Nugraha dkk., 2013).

KESIMPULAN

Variabel Pengendalian Intern, Transparansi, dan Penerapan Aplikasi SISKEUDES memiliki pengaruh positif signifikan pada Akuntabilitas Keuangan Desa. Semakin baik Pengendalian Intern, Transparansi, dan Penerapan Aplikasi SISKEUDES artinya pada Akuntabilitas Keuangan Desa makin tinggi pula.

Implikasi dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi dan edukasi bagi masyarakat kabupaten Badung mengenai hubungan pengendalian intern, transparansi, penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Implikasi lainnya yakni bisa jadi bahan evaluasi khususnya bagi perangkat desa Kabupaten Badung dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan itu jadi bisa memberikan kesejahteraan untuk kepentingan publik.

Keterbatasan penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran angket, jadi tidak memungkiri terdapatnya pandangan yang berbeda dengan kondisi dilapangan yang sesungguhnya. Selain itu, penelitian ini cuma berfokus terhadap desa di Kabupaten Badung, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan waktu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas jangkauan penyebaran kuesioner penelitian agar merata, menambah jumlah responden dan demografi serta dapat juga menambah variabel independen ataupun mediasi lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas, serta pengumpulan data dapat menggunakan metode lain tidak hanya berdasarkan kuesioner seperti wawancara langsung dengan responden. Pemerintah desa disarankan agar semakin meningkatkan kemampuan serta pemahaman berkaitan dengan pentingnya SISKEUDES, SPIP serta transparansi untuk mengatur dana desa agar pengelolaan dana desa diselenggarakan secara baik oleh pemerintah desa. Pemerintah desa pun diminta supaya semakin transparan terkait pengelolaan dana desa dengan tujuan terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan yang kerap terjadi sekarang ini.

BIBLIOGRAFI

Abdul Halim. (2022). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Pertama)*. Salemba Empat.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Akuntabilitas Keuangan Desa

- Arikunto Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Balipost.com. (2019a, February 13). *Sidang Korupsi APBDES, Oknum Perbekel Baha Dipenjara 4,5 Tahun*.
- Balipost.com. (2019b, September 10). *Klian Pura Dalem Kebon Diadili Kasus Korupsi*.
- Balipuspanews.com. (2020, January 20). *Dua Kasus Dana Desa di Denpasar Segera Dimeja Hijaukan*.
- databoks.katadata.co.id. (2023, January 17). *10 Provinsi dengan Laporan Kasus Korupsi Terbanyak pada 2021*.
- Debi Putri Pertiwi. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). *Jom FEKON*, 2(2).
- Eli Budi Santoso. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *. Indonesia Accounting Journal*, 2(2).
- Fajri R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *. Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099–1104.
- G.Ayu, T.Sulina, & M.A Wahyuni. (2017). Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba , Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(2).
- Harafonna, Cut Nadhifa, & Indriani Mirna. (n.d.). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jimeka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2).
- Hermadhani Adi Nugraha, Astuti, & Yuli Widi. (2013). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *. Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 25–33.
- Imam Ghozali. (n.d.). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Universitas Diponegoro.
- Kementrian Keuangan. (n.d.). *Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Desa*.

- Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, & Hendrik Gamaliel. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- M.M Juardi. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, IV*, 84–107.
- Muhammad Sapril Sardi Juardi. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, IV*(1).
- Nusabali.com. (2017, October 23). *Muncul Laporan “Korupsi” Dana Desa*.
- Parwati, Kadek Juni, I Gusti Ayu Purnamawati, & Made Aristia Prayudi. (2017). Pengaruh Kompetensi Pendamping Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa, dan Komitmen Aparatur Desa terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha* , 8(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Rita Martini, Lianto, Naufal, Hartati, Sukmini, Zulkifli, Widyastuti, & Endah. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- SI Hanifah. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). . *E-Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. , 4.
- Siti Hasanah, Siregar, & Tapi Rumondang. (2021). . Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Perpajakan Indonesia*, 9(1).
- Umami Risyah, & Idang Nurodin. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen*, 6(11), 74–80.
- Vicko Pratama, & Rahayu Amalia. (2019). Analisa Kesuksesan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dengan Model Delone dan Mclean (Studi Kasus : Kabupaten Ogan Komering Ilir). *Bina Darma Conference on Computer Science*, 1(8).

Copyright holder:

Putu Putri Prawitasari, Made Ratih Nurmalasari, Ayu Indira Dewiningrat, Ni Putu Ari
Krismajayanti (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

